



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Taufik Kurniawan Mendekam di KPK
Tanggal : Sabtu, 03 November 2018
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 20



Antara/Wibowo Armando

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) dikanal petugas seusai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (2/11). Taufik Kurniawan resmi ditahan

oleh KPK atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016.

Taufik Kurniawan Mendekam di KPK

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengenakan 'rompi oranye' kepada Wakil Ketua DPR RI yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap APBD Kabupaten Kebumen Taufik Kurniawan. Penahanan Taufik dilakukan selepas diperiksa KPK sebagai tersangka.

Menjalani pemeriksaan sekitar 9 jam, Taufik tidak berkomentar banyak terkait dengan substansi pemeriksaan atau kasus yang tengah menjerat dirinya.

"Secanggih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah-lah yang paling sempurna," ujarnya sebelum meninggalkan Gedung KPK, Jumat (2/11).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengaku akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang berlangsung di KPK.

Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembahasan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen pada 30 Oktober lalu.

Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa Taufik Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran Taufik Kurniawan dalam kasus pembahasan DAK fisik tahun anggaran 2016 diperinci melalui pendekatan atau pertemuan yang dilaku-

kan dengan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad.

"Setelah dilantik, MYF [Mohammad Yahya Fuad] melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk anggota DPR, salah satunya TK [Taufik Kurniawan] selaku wakil ketua DPR periode 2014—2019," ujar Basaria saat mengumumkan peningkatan status penyidikan di KPK, Selasa (30/10).

Saat itu, DPR tengah membahas alokasi DAK senilai Rp100 miliar. Diduga, ada permintaan *fee* sebesar 5% dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

"MYF menyanggupi *fee* 5% dan kemudian meminta *fee* 7% pada rekanan di Kebumen," kata Basaria.

Pertemuan dan penyerahan uang dilakukan bertahap di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta. Dari rencana penyerahan ketiga, KPK melakukan operasi tangkap tangan.

Selain itu, di hari yang sama KPK resmi menetapkan Cipto Waluyo, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014—2019 sebagai tersangka.

Cipto diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan atau pembahasan APBD Kabupaten Kebumen periode 2015—2016, pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen periode 2015—2016, dan pokok pikiran DPRD Kebumen tahun 2015—2016. (Rahmad Fauzan)